JIUBJ

Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(3), Oktober 2022, 1573-1582
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi
ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print)
DOI 10.33087/jiubj.v22i3.2581

Pengaruh Kemandirian, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Dessy Ari Permatasari, Sri Trisnaningsih
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Surabaya
Correspondence email: dessyarip@gmail.com, trisna.ak@upnjatim.ac.id

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kemandirian, efektifitas pendapatan asli daerah dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur (BPKAD). Penelitian ini bersifat kuantitas dengan jenis data berupa data dokumenter. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Timur yang terdiri dari 9 Kota dan 29 Kabupaten yang terdapat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur (BPKAD) dengan periode pengamatan pada tahun 2014-2018. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling dengan jumlah sampel 190 data. Penelitian ini dianalisis dengan regresi linier sederhana dengan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Daerah, serta Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

Kata kunci : kemandirian daerah; efektifitas pendapatan daerah; belanja daerah; kinerja keuangan daerah

Abstract. *This study aims to examine and analyze the effect of independence, effectiveness of local revenue and regional expenditures on regional financial performance at the Regional Financial and Asset Management Agency of East Java Province (BPKAD). This research is quantitative in nature with the type of data in the form of documentary data. The population used in this study were all regencies and cities in East Java Province which consisted of 9 cities and 29 regencies contained in the Regional Financial and Asset Management Agency of East Java Province (BPKAD) with an observation period in 2014-2018. The sampling technique in this research is purposive sampling technique with a sample of 190 data. This study was analyzed by simple linear regression using the SPSS program. The results of this study indicate that Regional Independence, Effectiveness of Regional Revenue, and Regional Expenditures have a positive effect on Regional Financial Performance.*

Keywords **:** *regional independence; effectiveness of regional revenue; regional expenditures; regional financial performance*

PENDAHULUAN

Kinerja Keuangan Daerah merupakan suatu gambaran tentang tingkat pencapaian pelaksanaan pemerintah daerah dalam suatu program atau kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi, sekaligus visi yang telah ditetapkan dalam suatu program dalam periode tertentu (Bastian, 2010). Kinerja keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah yang berguna untuk mengelola sumber keuangan yang terdapat pada daerah itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan dan mendukung dalam proses berjalannya suatu pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat**.** Dalam mengelola keuangan daerah yang baik berpengaruh besar terhadap kondisi suatu daerah dan dapat menjadikan daerah tersebut kuat dan berkuasa dari pada daerah lainnya. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara efektif, efisien, ekonomis serta transparansi dan akuntabilitas dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang bisa mengurangi jumlah pengangguran dan mengurangi kemiskinan. Faktor yang paling utama dalam meningkatnya pertumbuhan perekonomian yaitu dengan dilakukannya peningkatan investasi antara lain adalah peningkatan ketersediaan infrastruktur yang layak dan memadai, baik itu kualitas maupun kuantitas.

Dalam melaksanakan peningkatan ketersediaan infrastruktur yang layak di daerah, perlu adanya campur tangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang harus bekerjasama untuk dapat terciptanya efektifitas dan efisiensi suatu pemerintah kota/ kabupaten tersebut dan menjamin sumber daya manusia yang ada di daerah. Selain itu, pemerintah daerah dapat juga mengatur strategi pembangunan infrastruktur yang lebih fleksibel, agar dapat menciptakan kedekatan antara pemerintah daerah dan masyarakat, sehingga berbagai keinginan masyarakat dapat terpenuhi oleh pemerintah daerah. Misalnya, dapat berguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik terpenuhi, dan kemakmuran di masyarakat. Hal itu dilaksanakan agar tidak adanya masalah yang menimbulkan suatu polemik yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota/ kabupaten dan masyarakat tersebut.

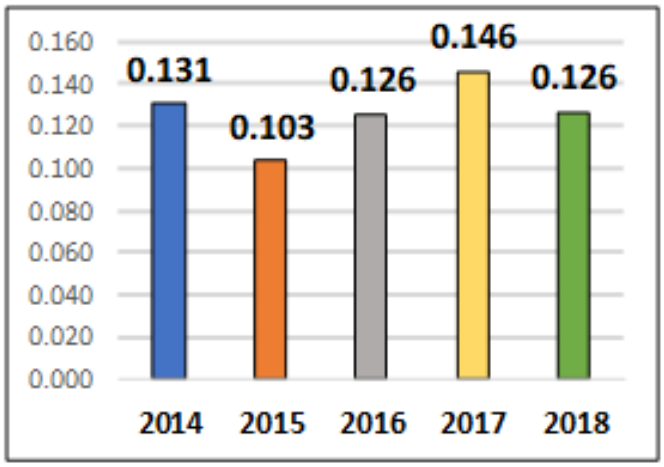
Untuk mengurangi suatu polemik tersebut dan mendukung penyelenggaraan otonomi daerah maka dengan adanya penyediaan sumber-sumber pendanaan, disahkannya UU Nomor 25 Tahun 1999 yang diubah menjadi lahirnya UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan tersebut menurut UU nomor 33 tahun 2004 dan PP Nomor 55 Tahun 2005 terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum,dan

Dana Alokasi Khusus. Didalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah diharuskan dapat mengatur keuangan daerahnya masing-masing.

Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu bentuk desentralisasi yang telah menerapkan otonomi daerah dengan landasan UU No 32 Tahun 2004 dan UU No 33 Tahun 2004 sebagai dasar-dasar penyelenggaraan pemerintah di daerah, dengan prinsip demokratis, peran serta masyarakat, pemetaan, keadilan dan memperhatikan potensi serta keanegaragaman daerah. Peraturan Perundang tersebut menuntut peran legislatif yang semakin besar dengan kedudukan yang terpisah dari eksekutif, kepala daerah bertanggung jaawab kepada DPRD, bukan lagi kepada presiden, serta adanya kepastian bahwa pelaksanaan pemerintahan dapat ikut diawasi oleh masyarakat melalui DPRD. Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001 Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur memikul tugas yang harus memberikan inovasi dalam sistem pemerintahan kearah yang lebih baik untuk menjadi lebih mandiri didalam mengelola dan meningkatkan kinerja keuangan daerahnya yang akan dipertanggung jawabkan kepada pemerintah pusat bahkan masyarakat Kabupaten dan Kota tersebut sendiri. Dalam rangka penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah diperlukan pendanaan yang dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaporan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Kinerja pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan, mengingat bahwa pemerintah daerah berhak, berkewajiban, dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat (UU No. 23 Tahun 2014). Kinerja pemerintah daerah harus dapat bekerjasama dengan pemerintah pusat, karena pemerintah daerah mengatur seluruh jalannya program-program dalam meningkatkan suatu keuangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan disetujui oleh pemerintah pusat. Untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan adalah menganalisis dan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan membandingkan pencapaian yang telah dibuat oleh pemerintah daerah dari tahun sebelumnya dengan tahun periode berikutnya sehingga dapat diketahui apakah tujuan pemerintah daerah tercapai dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah terebut.

Pengukuran kinerja keuangan Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai pada periode tahun 2014-2018. Hal ini akan terlihat dari tingkat rasio perhitungan dan juga persentase pencapaian dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Penggunaan rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh (Hamzah, 2007). Semakin tinggi rasio efisiensi maka semakin buruk kinerja, sedangkan semakin rendah rasio efisiensi menunjukkan kinerja yang baik.



Sumber: Data olahan

Gambar 1
KKD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2014 – 2018

Berdasarkan data selama periode tahun 2014-2018, perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur mengalami tren peningkatan dan penurunan pada masing-masing daerah. Pada tahun 2014, rata-rata rasio penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur masih sebesar 0,131. Angka tersebut mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 0,103 dengan persentase penurunan sebesar -21,37%. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan menjadi 0,126 atau sebesar 22,33%, pada tahun 2017 meningkat Kembali menjadi 0,146 atau sebesar 15,87% dan pada tahun 2018 kembali terjadi penurunan menjadi 0.126 atau sebesar -13,70%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur dalam periode lima tahun tersebut mulai dari 2014 - 2018 mengalami peningkatan dan juga penurunan

Menurut Mardiasmo (2002) sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer sektor publik dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishment system. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud antara lain

(Ulum, 2005): (a) Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah dengan cara berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik; (b) Pengukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan; dan (c) Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Kinerja sektor publik bersifat multidimensional, sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komprehensif. Berbeda dengan sektor swasta, karena sifat output yang dihasilkan sektor publik lebih banyak bersifat intangible output, maka ukuran finansial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja sektor publik. Oleh karena itu perlu dikembangkan ukuran nonfinansial. Halim (2012) menyatakan, ada beberapa rasio penilaian yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD. Rasio penilaian tersebut merupakan factor yang dianggap dapat memberikan pengaruh terhadap realisasi pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah. Rasio penilaian tersebut yaitu antara lain : (a) Rasio Kemandirian Keuangan; (b) Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan (c) Rasio Pertumbuhan.

Menurut Halim (2012) Rasio Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rasio kemandirian bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber daya ekstren dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Sumber keuangan adalah kriteria dasar yang paling penting secara nyata untuk mengetahui kemampuan di daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri karena untuk mengatur rumah tangga daerah membutuhkan biaya. Tatanan pemerintah yang mengarah kepada diperluas otonomi daerah, menuntut kemandirian daerah didalam mengatur dan menetapkan peraturan pemerintah daerah tersebut berdasarkan pedoman dan pendapat masyarakat. Untuk mempersiapkan kemandirian daerah, yang dilakukan suatu daerah yaitu dengan tidak memperlemah struktur perekonomian sehingga pemerintah daerah tersebut bisa memiliki sumber keuangan yang memadai.

Dalam menciptakan kemandirian di setiap daerah, pemerintah harus dapat berupaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk masyarakat dan memperbaiki berbagai sektor yang dapat mengembangkan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut diantara lain adalah pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Terutama dengan pengenaan pajak, pajak itu sendiri adalah sumber utama dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Dalam meningkatkan kemandirian setiap daerah, pemerintah juga harus dapat memaksimalkan pendapatan yang dimiliki.

Penjelasan mengenai berpengaruh signifikannya aspek Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap tingkat Kinerja Keuangan Daerah didukung oleh penelitian Groves dkk. dalam Ningsih (2010), yang menjelaskan bahwa kemandirian daerah tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi tersebut adalah faktor lingkungan, kesejahteraan, dan finansial. Hubungan faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap kemandirian daerah yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun hasil tersebut tidak didukung penelitian (Mahmud dkk., 2014) yang menjelaskan bahwa tingkat Kemandirian Keuangan Daerah tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap tingkat Kinerja Keuangan Daerah. Dimana kemandirian suatu daerah tidak semakin baik, bahkan yang terjadi adalah ketergantungan kepada pemerintah terhadap transfer dari pemerintah pusat akan semakin besar. Hal ini menunjukkan bahwa jika belanja modal sangat berpengaruh dari dana yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada masing-masing daerah (Susilo & Adi, 2007). Suatu terciptanya daerah yang mandiri menunjukkan bahwa Pemerintah darah tersebut dapat melaksanakan pembiayaan sendiri dan melayani masyarakat dengan baik melalui pelayanan publik yang telah disediakan dari sumber-sumber pendapatan daerah yakni dari pajak daerah dan retribusi yang merupakan pendapatan asli yang dihasilkan oleh daerah tersebut.

Kemudian komponen yang kedua yang dinilai dapat berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah itu sendiri adalah suatu pendapatan yang berasal dari daerah berdasarkan undang-undang yang digunakan dan sesuai oleh pemerintah daerah berguna untuk kesejahteraan masyarakat suatu daerah tersebut. Jadi, pemerintah daerah itu sendiri harus dapat melakukan investasi berupa hal-hal yang dapat menambah peningkatan pelayanan publik di masyarakat. Kesediaan untuk melihat kemampuan daerah itu sendiri dari segi keuangan daerah untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, maka dapat dilihat dalam komponen dari penerimaan daerah yang telah ada. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang sah dikelola daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi peran yang ada dalam pendapatan asli daerah didalam pendapatan daerah maka merupakan cermin keberhasilan usaha dan tingkat kemampuan dalam hal membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah tersebut.

Penjelasan mengenai berpengaruh signifikannya aspek Pendapatan Asli Daerah terhadap tingkat Kinerja

Keuangan Daerah didukung oleh penelitian Darwanis dan Saputra (2014),yang menjelaskan bahwa dengan meningkatnya upaya peningkatan pembangunan infrastruktur untuk dapat digunakan oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan produktifitas masyarakat dalam melakukan pekerjaannya, dengan ini masyarakat dapat membayar segala macam bentuk pajak dan retribusi daerah yang nantinya akan meningkatkan pendapatan asli daerah, peningkatan pendapatan asli daerah ini juga yang kemudian akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi tuntutan masyarakat. Suatu daerah tidak akan mungkin berhasil jika daerah tersebut tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti, meskipun pendapatan asli daerah mengalami peningkatan. Hal itu dikarenakan pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tujuan yang penting bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pembangunan sarana dan prasarana memiliki dampak yang sangat berguna terhadap kenaikan pajak daerah. Dengan maksimalnya fasilitas publik yang tersedia maka hal tersebut berpengaruh pada meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Mardiasmo dalam Arwati & Hadiati, 2013).

Namun hasil tersebut tidak didukung penelitian Azhar (2021) yang menjelaskan bahwa tingginya kemampuan daerah dalam menghasilkan dan mengelola pendapatan asli daerah, maka tidak akan tinggi pula tindakan dan keputusan dalam hal menggunakan pendapatan asli daerah tersebut yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan pembangunan daerah. Peningkatan PAD yang tinggi dihasilkan oleh pajak daerah yang dinilai paling strategis untuk bisa meningkatkan target PAD seperti pajak restorandan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan/BPHTB. Hasil inilah yang membuktikan bahwa semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah tidak dapat mempengaruhi peningkatan kinerja keuangan daerah tersebut. Kemudian komponen yang ketiga yang dinilai dapat berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah adalah Pembiayaan Belanja Daerah. Pengalokasian belanja daerah sebaiknya berdasarkan dengan kebutuhan masing-masing suatu daerah yang banyak membutuhkan anggaran belanja tersebut. Menurut UU Nomor 33 tahun 2004, salah satu variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana adalah luas wilayah. Daerah dengan wilayah yang lebih luas tentulah membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas, maka agar tidak terjadi ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan lainnya, oleh karena itu, pemerintah mengalokasikan anggaran dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang berguna untuk membiayai kebutuhan daerah-daerah.

Belanja daerah adalah semua pengeluaran yang berasal dari rekening kas umum daerah yang menimbulkan kurangnya ekuitas dana sebagai kewajiban suatu daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh daerah tersebut. Adapun struktur belanja daerah yang terdiri Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja Langsung yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Belanja Tidak Langsung juga dibedakan tersendiri yang terdiri atas Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Subsidi, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Pegawai Harian, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, serta Belanja Tak Terduga.

Belanja Langsung adalah Belanja yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang berguna untuk semua masyarakat yang berupa program-program yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain: pelayanan barang, jasa, dan fasilitas untuk masyarakat. Dan Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang bersifat operasional setiap saat dibelanjakan tetapi tidak langsung berkaitan dengan masyarakat. Semakin tinggi penganggaran belanja tidak langsung maka semakin rendah pengalokasian anggaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat sendiri. Jika pemerintah tidak adil dalam pembagian belanja langsung dan tidak langsung maka dapat mengorbankan pengalokasian belanja langsung yang berguna untuk pemberian tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada para pegawai dan pejabat daerah.

Salah satu komposisi terbentuknya Belanja Langsung adalah Belanja Modal. Dimana belanja modal itu sendiri dapat langsung dirasakan oleh masyarakat yang juga berguna untuk jangka panjang. Belanja modal yaitu belanja yang berguna untuk membiayai kegiatan investasi yang dilakukan kepada masyarakat untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang hasilnya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Jika pemerintah daerah mempunyai komitmen tinggi untuk mensejahterakan masyarakat, maka bukan saja hanya meningkatkan anggaran belanja modal, tetapi akan meningkatkan juga keseluruhan belanja daerah. Untuk dapat melakukan pembiayaan belanja modal pemerintah harus melakukan rencana bagaimana terpenuhinya sumber pendapatan daerah. Semakin meningkatnya belanja daerah maka semakin besar pula dana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah yang juga akan dirasakan oleh masyarakat. Dengan terlengkapinya kebutuhan pemerintah daerah tersebut maka diharapkan masyarakat juga akan mengalami kesejahteraan.

Penjelasan mengenai berpengaruh signifikannya aspek Pembiayaan Belanja Daerah terhadap tingkat Kinerja Keuangan Daerah didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Astati dkk., 2016), yang menjelaskan bahwa banyaknya dana yang dialokasikan untuk belanja modal maka nantinya dapat mewujudkan terciptanya infrastruktur dan sarana yang semakin banyak pula. Apabila semakin banyak pembangunan yang dikerjakan

oleh pemerintah maka nantinya dapat pula meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan daerah. Dapat disimpulkan jika sumber yang dihasilkan berlimpah maka nantinya hasil yang didapat pun juga akan melimpah pula. Selain untuk mengembangkan infrastruktur industri, belanja modal juga ditujukan memberikan layanan kepada masyarakat yaitu salah satunya melalui infrastruktur jasa. Namun hasil penelitian tidak didukung penelitian Anggraeni (2016) yang menjelaskan bahwa realisasi belanja yang tidak tepat sasaran, pembangunan yang tidak merata serta alokasi pembiayaan keuangan daerah yang lebih besar pada aspek pertumbuhan lainnya jika dibandingkan terhadap alokasi belanja modal atau belanja pembangunan akan dapat mengurangi tingkat efektivitas belanja modal daerah terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kemandirian, efektifitas pendapatan asli daerah dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur dalam periode lima tahun tersebut mulai dari 2014 – 2018.

METODE

Gambaran objek dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan variabel-variabel penelitian sesuai dengan yang diketahui bahwa variabel independen adalah rasio kemandirian daerah, efektifitas pendapatan asli daerah, dan pengelolaan belanja daerah. Sedangkan, variabel dependen adalah kinerja keuangan daerah. Objek penelitian merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan dalam penelitian. Objek penelitian menjadi sasaran untuk mendapatkan jawaban atau solusi dari permasalahan yang terjadi. objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur. Alasan dipilihnya objek ini adalah untuk mengetahui pengalokasian dana dan penggunaan dana yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur itu sendiri. Karena setiap periode Laporan Keuangan tersebut bisa berubah-ubah. Dan selain itu, pemilihan Propinsi Jawa Timur di dasarkan pada pertimbangan bahwa Jawa Timur merupakan Propinsi paling besar di Pulau Jawa.

Penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif (*Causal-Comparative Research*), merupakan penelitian yang memiliki tipe penelitian dengan karakteristik berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2013). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter. Data dokumenter merupakan jenis data penelitian yang berupa arsip memuat apa dan kapan suatu transaksi serta siapa yang terlibat dalam suatu kejadian, data ini dikumpulkan dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah yang terdapat pada BPKAD Propinsi Jawa Timur. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data sekunder adalah data yang pada umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah terpublikasi. Sumber data yang diperoleh untuk penelitian ini dari meminta data Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Tahun 2014-2018 yang diperoleh dari BPKAD Propinsi Jawa Timur. Pada penelitian ini cara untuk mengumpulkan data yang pertama adalah meminta Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang terdapat pada BPKAD, kemudian peneliti melakukan pengecekan terhadap laporan realisasi anggaran pemerintah daerah tersebut selama periode 2014-2018, selanjutnya peneliti menganalisis laporan realisasi anggaran tersebut yang akan dijadikan untuk menghitung dalam variabel independen dan variabel dependen.

Teknis Analisis

1. *Statistik* Deskriptif. Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini berguna untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai suatu data yang menunjukkan hasil dari pengukuran rata-rata (mean), standar deviasi (standard deviation), dan nilai maksimum dan nilai minimum serta jumlah data (Ghozali, 2013).
2. *Statistik* Inferensial. Statistik Inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu secara acak (Sugiyono, 2013). Didalam statistik inferensial dalam penelitian ini terdapat (1) Spesifikasi Model; (2) Uji Asumsi Klasik dan; (3) Uji Kelayakan Model.
3. *Model Spesifikasi*. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah rasio kemandirian daerah, efektifitas pendapatan asli daerah, dan pengelolaan belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Analisis regresi linear berganda ini dapat dimodelkan dalam persamaan sebagai berikut: KKD = α +β1 RKD + β2 EPAD + β3 PBD + e. Dimana: KKD : Kinerja Keuangan Daerah; α : Konstanta; RKD : Rasio Kemandirian Daerah; EPAD : Efektifitas Pendapatan Asli Daerah; PBD : Pengelolaan Belanja Daerah; β1 β2 β3 : Koefisien Regresi; e : error

Uji Asumsi Klasik

Pengujian yang dilakukan untuk melihat dan menilai kualitas data dengan uji asumsi klasik. Sebelum dilakukan pengujian untuk menguji hipotesis dilakukan uji asumsi klasik menilai apakah terdapat bias dalam sampel yang diuji. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokolerasi, dan uji heteroskedastisitas.

Uji Kelayakan Model

Terdapat 2 (dua) Uji Kelayakan Model pada penelitian ini,yaitu Uji F dan Uji R2 atau sering disebut juga Koefisien Determinasi.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk mengukur hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah Uji t.

HASIL

Tabel 1
Persamaan Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std Error	B		
(Constant)	2.83	.36		7.73	.00
RKD	2.25	.52	.16	3.40	.01
EPAD	3.14	.21	.34	3.22	.00
PBD	1.75	.31	.15	3.40	.02

Sumber: Data olahan

Tabel 1 menjelaskan persamaan analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

KKD = 2,83 + 2,25 RKD + 3,14 EPAD + 1,75 PBD + e

Persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Nilai konstan sebesar 2,83 karena konstanta yang positif menunjukkan bahwa semua variabel independen dianggap konstan, maka kinerja keuangan daerah akan mengalami peningkatan sebesar 2,83
b. Berdasarkan analisis regresi linear berganda tersebut bahwa rasio kemandirian daerah memiliki koefisien regresi yang positif sebesar 2,25 yang berarti bahwa rasio kemandirian daerah searah dengan kinerja keuangan daerah. Hal tersebut dapat disimpulkan jika rasio kemandirian daerah mengalami peningkatan dengan persepsi variabel lainnya konstan, maka kinerja keuangan daerah juga akan mengalami peningkatan sebesar 2,25.
c. Nilai koefisien regresi variabel efektifitas pendapatan asli daerah juga memiliki koefisien regresi yang positif sebesar 3,14 yang berarti bahwa efektifitas pendapatan asli daerah memiliki hubungan searah dengan kinerja keuangan daerah. Hal ini dapat disimpulkan jika efektifitas pendapatan asli daerah mengalami peningkatan dengan persepsi variabel lainnya konstan, maka kinerja keuangan daerah juga akan mengalami peningkatan 3.14.
d. Nilai koefisien regresi pada variabel pengelolaan belanja daerah dimana memiliki nilai positif sebesar 1,75 yang berarti bahwa pengelolaan belanja daerah memiliki hubungan searah dengan kinerja keuangan daerah. Hal tersebut dapat disimpulkan jika pengelolaan belanja daerah mengalami peningkatan dengan persepsi variabel lainnya konstan, maka kinerja keuangan daerah juga mengalami peningkatan sebesar 1,75.

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		190
Normal Parameters[a,b]	Mean	.000
	Std. Deviation	.864
Most Extreme Differences	Absolute	.080
	Positive	.080
	Negative	-.066
Kolmogorov-Smirnov Z		.080
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c,d]

Sumber: Data olahan

Tabel 2 menjelaskan bahwa nilai *kolmogorov smirnov* Z sebesar 0,080 dengan tingkat signifikan 0,200, maka hal itu menunjukkan jika variabel penelitian berdistribusi normal karena tingkat signifikasinya 0,200 > 0,005 sehingga rasio kemandirian daerah, efektifitas pendapatan asli daerah, pengelolaan belanja daerah dan kinerja keuangan daerah berdistribusi normal. Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,791. Maka nilai Durbin-Watson diketahui angka yang diantara -2 sampai 2 (-2 < 1,791 < 2) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokolerasi dalam model regresi ini.

Tabel 3
Hasil Uji Autokolerasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.754[a]	.796	.793	.871	1,791

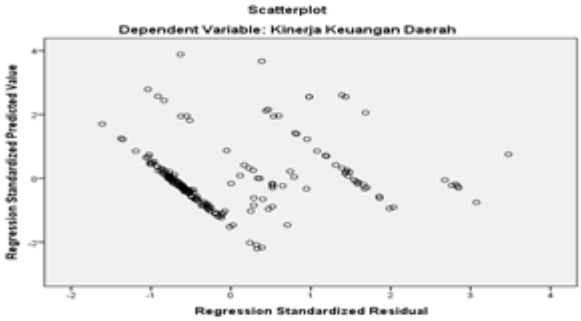
Sumber: Data olahan

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	RKD	.969	1.032
	EPAD	.968	1.033
	PBD	.977	1.024

Sumber: Data olahan

Tabel 4 diatas menunjukkan jika nilai *tolerance* ketiga variabel yaitu RKD sebesar 0,969, variabel EPAD sebesar 0,968 dan variabel PBD sebesar 0,977. Sedangkan nilai *Varians Inflation Factor* (VIF) ketiga variabel yaitu variabel RKD sebesar 1,032, variabel EPAD sebesar 1,033 dan variabel PBD sebesar 1,024. Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa angka *tolerance* diatas 0,1 dan nilai *Varians Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10, maka antar variabel independen dan model regresi tidak terjadi multikolinearitas



Sumber: Data olahan

Gambar 2
Grafik Scatterplot

Gambar 2 *scatterplot* dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak baik diatas ataupun dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu, maka dapat dikatakan jika data didalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Tabel 3 juga menunjukkan jika nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,793 yang berarti bahwa variabel independen yang terdiri dari rasio kemandirian daerah, efektifitas pendapatan asli daerah, dan pengelolaan belanja daerah secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah sebesar 79,3%. Sedangkan sisanya 100% - 79,3% = 20,7%. Hal ini menunjukkan masih jika variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah.

Tabel 5
Hasil Uji F

	Model	Sum of Square	Df	Mean Square	F	Sig
1	Regression	36.692	3	12.231	16.098	.000[b]
	Residual	141.319	186	.760		
	Total	178.011	189			

Sumber: Data olahan

Tabel 5 menjelaskan hasil pengolahan data tersebut diatas dapat dilihat bahwa nilai F sebesar 16,098 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Dalam hal ini jika model regresi pada penelitian ini layak untuk digunakan karena memiliki tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05. Tabel 1 juga menunjukkan bahwa pengaruh rasio kemandirian daerah (RKD), efektifitas pendapatan asli daerah (EPAD), dan pengelolaan belanja daerah (PBD) terhadap kinerja keuangan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Hasil analisis tersebut menunjukkan nilai t sebesar 3,40 dan tingkat signifikansi sebesar 0,01. Hal ini dapat dilihat tingkat signifikansi rasio kemandirian daerah 0,01 < 0,05 yang berarti bahwa rasio kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Dengan demikian, uji t ini mendukung hipotesis yang pertama bahwa rasio kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.
2. Pengaruh Efektifitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah, Hasil analisis tersebut menunjukkan nilai t sebesar 3,22 dan nilai signifikansi sebesar 0,00. Hal ini dapat dilihat tingkat signifikansi efektifitas pendapatan asli daerah 0,00 < 0,05 yang berarti bahwa efektifitas pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Dengan demikian, uji t mendukung hipotesis yang kedua bahwa efektifitas pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.
3. Pengaruh Pengelolaan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Hasil analisis tersebut menunjukkan nilai t sebesar 3,409 dan nilai signifikansi sebesar 0,02. Hal ini dapat dilihat tingkat signifikansi pengelolaan belanja daerah 0,02 < 0,05 yang berarti bahwa pengelolaan belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Dengan demikian, uji t mendukung hipotesis yang ketiga bahwa

pengelolaan belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

Pengaruh Variabel Rasio Kemandirian Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Pada penelitian ini berdasarkan hasil pengujian statistik digunakan untuk variabel rasio kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini dapat ditunjukkan pada tabel 7 bahwa t hitung sebesar 3,40 dengan nilai signifikan 0,01 lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien 2,25. Hasil menunjukkan bahwa rasio kemandirian daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, yang artinya tinggi rendahnya tingkat rasio kemandirian daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Rasio kemandirian daerah menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama. Semakin tinggi kesejahteraan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah juga semakin tinggi. Dilihat secara keseluruhan bahwa rata-rata kemandirian daerah sebesar 20,24%. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemandirian suatu daerah telah maksimal. Sehingga rasio kemandirian daerah adalah faktor untuk mempertimbangkan dalam kinerja keuangan daerah. Hasil ini mendukung penelitian Groves dkk. dalam Ningsih (2010) kemandirian daerah tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi tersebut adalah faktor lingkungan, kesejahteraan, dan finansial. Hubungan faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap kemandirian daerah yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian oleh Mahmud dkk. (2014) bahwa rasio kemandirian daerah tidak berpengaruh dengan kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan di Provinsi Sulawesi Utara masih menunjukkan rata-rata kinerja keuangan daerah yang masih belum stabil serta tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi.

Pengaruh Variabel Efektifitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Pada penelitian ini berdasarkan hasil pengujian statistik digunakan untuk variabel efektifitas pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini dapat ditunjukkan pada tabel 7 bahwa t hitung sebesar 3,22 dengan nilai signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien 3,14. Hasil ini menunjukkan bahwa efektifitas pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perolehan pendapatan daerah telah optimal sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah hal tersebut dapat dikatakan bahwa kemampuan pemerintah daerah masih kurang sehingga pemerintah daerah tersebut belum mampu menggali potensi daerah guna memperoleh efektifitas pendapatan asli daerah. Dan efektifitas pendapatan asli daerah serta merta dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah. Rasio Efektifitas merupakan gambaran atas kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah yang telah direncanakan dan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan menurut potensi riil daerah. Oleh sebab itu, efektifitas pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Darwanis dan Saputra (2014) mengemukakan jika pemerintah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pungutan yang bersumber pada pajak dan retribusi sehingga pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan daerah. Sebaliknya, penelitian ini tidak mendukung penelitian Damayanti (2018) menunjukkan bahwa adanya pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang bermakna bahwa penerimaan kekayaan daerah berupa PAD oleh pemerintah daerah tidak serta merta efektif untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah tersebut.

Pengaruh Variabel Pengelolaan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Pada penelitian ini berdasarkan hasil pengujian statistik digunakan untuk variabel pengelolaan belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini dapat ditunjukkan pada tabel 7 bahwa t hitung sebesar 3,409 dengan nilai signifikan 0,02 lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien 1,751. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Dan dapat dilihat dari nilai rata-rata sebesar 71% hal itu membuktikan bahwa telah maksimal dalam pengelolaan belanja daerah. Pengelolaan Belanja menunjukkan jika kegiatan belanja yang terjadi di pemerintahan daerah mempunyai perbandingan antara belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak sebesar dari total pendapatan yang masuk di anggaran pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat secara optimal menekan biaya realisasi belanja dan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak lebih besar dari total pendapatannya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Astati dkk. (2016) mengemukakan bahwa pengelolaan belanja daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Pratama dkk. (2015) menyebutkan bahwa belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, dan mengembangkan sistem jaminan sosial. Semakin tinggi belanja daerah, pemerintah daerah akan memberikan pelayanan yang lebih baik sekaligus berkualitas dan hal tersebut dapat berpengaruh dengan tingkat kinerja keuangan. Sedangkan, penelitian ini tidak

mendukung Nugroho dan Rohman (2012) bahwa pengelolaan belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Rasio Kemandirian Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Dalam hal ini adanya pengaruh rasio kemandirian daerah terhadap kinerja keuangan daerah menunjukkan bahwa tingkat suatu kemandirian suatu daerah mempengaruhi kinerja keuangan daerah tersebut. Efektifitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Pengaruh efektifitas pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah menunjukkan bahwa perolehan pendapatan daerah yang optimal dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah. Pengelolaan Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Pengaruh pengelolaan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah menunjukkan bahwa semakin pemerintah daerah secara optimal menekan biaya realisasi belanja, maka dapat berimplikasi pada kinerja keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, P. H. 2006. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan Dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). *Paper presented at the Simposium Nasional Akuntansi*, 9, Padang.

Anggraeni, A. 2016. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I Yogyakarta). *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 1*(1).

Anjani, P. P., Andrianty, S., & Widyaningasih, T. D. 2015. Pengaruh penambahan pandan wangi dank au manis pada teh herbal kulit salah bagi penderita diabetes. *Jurnal Pangan dan Agroindustri, 3*(1), 213-214.

Anzarsari, D. 2014. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota se-Jawa tengah). *Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1*(1).

Ardhini. 2011. Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Prespektif Teori Keagenan Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. *Skripsi*. Universitas Diponegoro, Semarang.

Arwati, & Hadiati. 2013. Pengaruh Pertumbuhan, Pendapatan Asli Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat. *Paper presented at the Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Terapan 2013*, Jawa Barat.

Astati, Y., Nyoman, D., & Mamba, N. P. S. H. 2016. Pengaruh Belanja Rutin dan Belanja Modal pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 1*(1), 1924-1950.

Azhar, I. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa. *Jurnal Transformasi Administrasi, 11*(2), 164-174.

Bastian, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.

Damayanti, N. K. J. 2018. Perbedaan Efektivitas Model Konseling Behavioral Dengan Teknik Modeling Dan Teknik Shaping Terhadap Self-Intraception Siswa Ditinjau dari Jenis Kelamin Siswa Kelas Xi Sma Negeri 1 Tabanan. *Jurnal Bimbingan dan Konselig Indonesia, 2*(1).

Darwanis, & Saputra, R. 2014. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh). *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, 1*(2).

Darwis, E. T. R. 2009. Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat). Universitas Negeri Padang, *1*(1).

Frelistiyani, W. 2010. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. Semarang: Universitas Diponegoro.

Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, A. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* (4 ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Hamzah, A. 2007. Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur (Studi pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2001-2006). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 4*(2), 211-228.

Indonesia, R. 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Perhitungan Anggaran Negara*. Jakarta

Jaya, I. P. N. P. K., & Dwirandra, A. A. N. B. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi 7*(1).

Kurniasih, L., & Marfiana, N. 2013. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Jurnal Penelitian Fakultas Ekonomi Unsoed, 3(1), 2-16.

Mahmud, M., Kawung, G., & Rompas, W. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 14*(2), 1-13.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

Matei, A., & Savulescu, C. (2009). Enchancing the efficiency of local government in the context of reducing the administrative expenditures. *University Library of Munich, 1*(1), 1-19.

Nanik, W. 2012. Analisa Rasio untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang. UIN Maliki.

Ningsih, A. T. 2010. Analisis Faktor Keuangan dan Faktor Lingkungan yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah). Universitas Sebelas Maret.

Nugroho, F., & Rohman, A. 2012. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Propinsi Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Accounting, 1*(1).

Otley, D. T. 1980. The contingency theory of management accounting: Achievement and prognosis. *Accounting, Organizations and Society, 5*(4), 413-428.

Pemda. 2014. *Undang-undang 23 Tahun 2014 Nomor 244*. Jakarta

PP. 2005. *Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan*. Jakarta

PP. 2008. *Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta

PP. 2019. *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta

Pratama, F., Susanto, W. H., & Purwantiningrum, I. (2015). Pembuatan Gula Kelapa dari Nira Terfermentasi Alami (Kajian Pengaruh Konsentrasi Anti Inversi dan Natrium Metabisulfit). *Jurnal Pangan dan Agroindustri 3*(4), 1272-1282.

Saraswati, D., & Rioni, Y. S. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 9*(2).

Setyorini, D. 2013. Pengaruh Dana Alokasi Umum (PAD), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Pemerintah daerah Kabupaten Klaten Tahun 2002-2010., *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Susilo, G. T. B., & Adi, P. H. 2007. Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah: Studi Empiris di Propinsi Jawa Tengah. *Paper presented at the Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, Surabaya.

Ulum, I. 2005. *Akuntansi Sektor Publik : Sebuah Pengantar* (1 ed.). Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

UU. 1999. *UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta

UU. 2004. *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta

Wahyuni, N. 2007. Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengeloaan Keuangan Daerah Kota Malang. *Jurnal El-Muhasaba, 1*(1), 01-2010.